



KETAHANAN PANGAN

BERBASIS *ROLE OF HOUSEHOLD STRUCTURE*

Di Desa Sindangsari Kabupaten Serang



Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si.
Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si.
Nikki Prafitri, S.Sos., M.Si.



KETAHANAN PANGAN

BERBASIS *ROLE OF HOUSEHOLD STRUCTURE*

Di Desa Sindangsari Kabupaten Serang

Buku monograf ini merupakan hasil penelitian penerapan kebijakan ketahanan Pangan keluarga yang berbasis *Role Of Household Structure* di desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Buku ini terdiri dari 6 Bab, yang diantara satu bab dengan lainnya saling berkaitan.

Buku membahas ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga di Desa Sindangsari dengan berdasarkan pada 3 aspek, yaitu : (a) ketersediaan dan distribusi pangan; (b) daya beli (*purchasing power*) rumah tangga untuk pangan dan (c) pengetahuan dan sosio-budaya yang membentuk kebiasaan makan (*food habit*) sebuah rumah tangga. Pada aspek ketersediaan dan distribusi pangan dibahas dalam 3 unsur yaitu sub sistem ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food acces*). penyerapan pangan (*food utility*), stability dan status gizi.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-405-011-0



**KETAHANAN PANGAN BERBASIS *ROLE*
OF HOUSEHOLD STRUCTURE DI DESA
SINDANGSARI KABUPATEN SERANG**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KETAHANAN PANGAN BERBASIS *ROLE OF HOUSEHOLD STRUCTURE* DI DESA SINDANGSARI KABUPATEN SERANG

**Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si.
Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si.
Nikki Prafitri, S.Sos., M.Si.**



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2021**

**KETAHANAN PANGAN BERBASIS *ROLE OF
HOUSEHOLD STRUCTURE* DI DESA
SINDANGSARI KABUPATEN SERANG**

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si.

Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si.

Nikki Prafitri, S.Sos., M.Si.

Desain Cover & Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, November 2021

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183

Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com

E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-405-011-0

xii + 94 hlm, 21 cm x 14,8 cm

Copyright © 2021 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dalam bentuk monograf yang berjudul “Ketahanan Pangan Berbasis *Role Of Household Structure* Di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang”.

Buku monograf ini merupakan hasil penelitian penerapan kebijakan ketahanan Pangan keluarga yang berbasis *Role Of Household Structure* di desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Buku ini terdiri dari 6 Bab, yang diantara satu bab dengan lainnya saling berkaitan.

Buku membahas ini factor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga di Desa Sindangsari dengan berdasarkan pada 3 aspek, yaitu : (a) ketersediaan dan distribusi pangan; (b) daya beli (*purchasing power*) rumah tangga untuk pangan dan (c) pengetahuan dan sosio-budaya yang membentuk kebiasaan makan (*food habit*) sebuah rumah tangga. Pada aspek ketersediaan dan distribusi pangan

dibahas dalam 3 unsur yaitu sub sistem ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food acces*). penyerapan pangan (*food utility*), stability dan status gizi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketersediaan pangan di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang terpenuhi melalui 3 cara : (1) memenuhi sendiri dengan menanam bahan pangan, (2) membeli di beberapa pasar, warung sayur dan kelontong serta penjaja keliling (3) bantuan pemerintah dalam berbagai program. Distribusi pangan terbagi distribusi menuju desa Sindangsari dalam rangka penyediaan pangan di desa dan distribusi keluar desa Sindangsari dalam rangka menjual hasil pertanian sebagai penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Daya beli pangan ditentukan oleh pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat di desa Sindangsari dipenuhi dengan bekerja di Pabrik-pabrik yang berada di luar desa, bercocok tanam, menjadi buruh tani, berdagang dan bisnis kos-kosan. Kebiasaan makan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, pola makan masyarakat di desa Sindangsari berbeda antara generasi,

social media mempengaruhi pola makan generasi muda dan anak-anak.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak keterbatasan, untuk itu saran dan kritik terhadap buku ini sangat penulis harapkan guna menyempurnakan buku ini.

Serang, November 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Urgensi Penelitian.....	19
1.3. Target Temuan.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1. Konsep Ketahanan Pangan	23
2.2. Ketahan Pangan Rumah Tangga (<i>Role</i>)	33
2.3. Pengertian Peran.....	34
2.4. Penelitian Terdahulu.....	39
BAB 3 METODE PENELITIAN DAN ROAD MAP PENELITIAN.....	41
3.1. Fokus Penelitian	41
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3. Kerangka Berfikir Penelitian	42
3.4. Instrumen Penelitian	42
3.5. Analisis Data	43

BAB 4	GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN	45
	4.1. Deskripsi Desa Sindangsari.....	45
	4.2. Kependudukan.....	46
BAB 5	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	5.1. Ketersediaan dan Distribusi Pangan	54
	5.1.1. Ketersediaan Pangan.....	54
	5.1.2. Distribusi Pangan.....	57
	5.2. Daya Beli Rumah Tangga Untuk Pangan	60
	5.3. Kebiasaan Makan/Food habit..	73
BAB 6	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	79
	6.1. Kesimpulan.....	79
	6.2. Rekomendasi	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN	87
	TENTANG PENULIS	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan.. 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Diagram Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Gambar 4.2 Komposisi Penduduk Berdasar- kan Tingkat Pendidikan	48
Gambar 4.3 Komposisi Penduduk Usia Kerja .	49
Gambar 4.4 Komposisi Penduduk Usia Sekolah	50
Gambar 4.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga (*household food security*) sampai dengan tingkat nasional menjadi bahasan penting dalam *World Food Summit* oleh organisasi pangan dunia *Food and Agriculture Organization* (FAO) di Roma pada bulan November tahun 2009. Menuut *Rome Declaration on World Food Security* menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi, serta memperoleh kehidupan yang bermartabat sehingga aksesnya terhadap pangan yang diinginkan sepanjang waktu perlu dijamin (dalam Darmawan, 2011:1).

Negara atau wilayah mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya, dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan ketahanan yang baik

terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup guna menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas dimasa yang akan datang. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa pemerintah dan pemda berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dan penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Dilansir dari laman disketapang.bantenprov.go.id (2021) terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah, yaitu meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan terutama untuk rumah tangga miskin dan akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi dan mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Ketahanan pangan merupakan salah satu syarat penting menurunkan angka kelaparan

dan kemiskinan sebagai target pertama dari MDGs dan mencapai kesejahteraan rakyat. Kemiskinan merupakan penyebab ketidaktersediaan pangan di tingkat keluarga sehingga terjadi kekurangan gizi. Kurang gizi berdampak terhadap tingginya angka kesakitan pada anak. Perbaikan gizi dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu rakyat bebas dari kemiskinan. Program pangan dan gizi disusun untuk mengatasi permasalahan pangan dan gizi. Tujuan program pangan dan gizi adalah untuk menyediakan pangan dalam jumlah, jenis dan mutu yang baik guna mencapai status gizi yang baik pula. Sasaran perbaikan gizi PJP II diantaranya adalah terwujudnya kesadaran gizi yang tinggi di masyarakat, yang tercermin dari pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bermutu gizi seimbang.

Kebijakan konsumsi pangan dimasa lalu belum memberikan perhatian yang seimbang pada pangan non beras, terutama penganeka ragam konsumsi pangan, serta lemahnya program pendidikan gizi dan pangan bagi masyarakat. Kondisi ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat dimana berbagai pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian, sagu dan

sebagainya dianggap sebagai bahan pangan inferior serta pola konsumsi pangan masyarakat didominasi oleh beras. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan telah berubah sesuai dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah, yaitu Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan terutama untuk rumah tangga miskin dan Akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi

Molledo.et.al (2014:2) dalam bukunya yang berjudul *Analyzing Food Security using Household Survey Data* menyampaikan bahwa terjadi ketidaksinambungan (*disconnection*) antara keberhasilan peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan berlanjutnya kelaparan dan kekurangan gizi di dunia. Skenario yang disusun mungkin dapat menghasilkan pasokan makanan yang mencukupi populasi secara agregat, namun antara satu rumah tangga dan rumah tangga yang lainnya akan terjadi kesenjangan, yang satu memiliki lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Terjadinya disparitas ini

mengungkap keterbatasan konsep yang hanya didasarkan pada ketersediaan pangan, Sejak itu perhatian telah bergeser ke akses pangan (*food access*) sebagai dimensi kunci ketahanan pangan: memastikan cukup pangan bukanlah kondisi yang cukup untuk ketahanan pangan kecuali akses yang sama terhadap pangan untuk masing-masing rumah tangga terjangkau.

Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan, yang ketiganya sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi ketahanan pangan terpenuhi. Sedangkan dimensi keempat adalah stabilitas, dimana sebuah populasi, rumah tangga maupun individu memiliki akses pangan yang cukup untuk setiap saat dan terhindar dari resiko kehilangan akses pangan yang diakibatkan oleh guncangan ekonomi, perubahan iklim atau gejolak politik dalam sebuah negara. Dimensi stabilitas juga bertujuan untuk memantau ketahanan pangan akibat variasi siklus atau pola cuaca tahunan (Molledo.et.al.2014:3)

Pada tahun 2012 *Committee on Food Security* merekomendasikan penggunaan definisi ketahanan pangan dan gizi sebagai berikut;

“Food and nutrition security exists when all people at all times have physical, social and economic access to food, which is safe and consumed in sufficient quantity and quality to meet their dietary needs and food preferences, and is supported by an environment of adequate sanitation, health services and care, allowing for a healthy and active life”

(Ketahanan pangan dan gizi terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang aman dan dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas untuk kebutuhan pangan dan preferensi makanan mereka, dan didukung oleh lingkungan sanitasi yang memadai pelayanan dan perawatan Kesehatan yang memungkinkan untuk hidup sehat dan aktif).
(Molledo.et.al.2014:3)

Indeks ketahanan pangan global atau *Global Food Security Index (GFSI)*, hasil kerja sama *The Economist* dan perusahaan sains bidang pangan *Corteva*, menunjukkan ketahanan pangan Indonesia cenderung

membalik dalam lima tahun terakhir. Skor nya bertambah dari 50,7 pada tahun 2015, naik menjadi 53,2 pada tahun 2017, dan 62,6 pada tahun 2019. Peringkat Indonesia juga terus naik dari posisi ke 75 pada tahun 2015, lalu posisi ke 68 pada tahun 2017, dan posisi ke 62 pada tahun 2019, dari 113 negara yang dievaluasi. Bagi Indonesia, kenaikan indeks itu menggambarkan perbaikan dalam pengadaan, daya beli, distribusi barang, atau kualitas pangan yang tersedia.

Dilansir dari [cnbc.com](https://www.cnbc.com) (2020) di Indonesia kondisi rentan pangan masih mencapai sekitar 7 (tujuh) juta penduduk yang menurut Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dikhawatirkan akan membahayakan stabilitas atas ketahanan nasional. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, menjelaskan ada 9 parameter yang menjadi indikator kerawanan pangan. Di antaranya, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65%. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi pokok

disebabkan karena berbagai faktor dimana meskipun produksi pangan meningkat, kendala dan akses pangan, pendapatan rumah tangga dan pendapatan nasional yang tidak memadai untuk membeli kebutuhan pangan dapat mengancam ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. (dalam Darmawan, 2011:1).

Dalam Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 disebutkan bahwa rentannya ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan tingkat nasional melalui empat dimensi yaitu ketersediaan, akses pangan, volatilitas harga, dan konsumsi serta dampaknya terhadap pendapatan produsen/ petani. Menurut data Bank Dunia, konsumsi kalori di sejumlah negara miskin berkurang sekitar setengah hingga satu persen Ketika harga bahan makanan mayoritas meningkat 1 %. Harga bahan pangan meningkat akibat tingginya permintaan pasokan bahan biofuel. Jika diekuivalenkan, jumlah orang yang terancam krisis pangan di dunia bisa meningkat hingga 16 juta bagi setiap peningkatan persentase dalam harga riil. Ini berarti ada 1,2 miliar orang terancam kelaparan kronis pada tahun 2025, 600 juta lebih banyak dari

perkiraan semula. Rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga antara lain disebabkan karena rendahnya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan terutama pada wanita, serta tingkat pendapatan masyarakat menjadi masalah pokok di masyarakat. Ketahanan pangan tingkat rumah tangga berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin sejak tahun 2009-2013 mengalami penurunan dari 14,15% pada tahun 2009 menjadi 11,37% pada tahun 2013 atau sekitar 28,07 juta orang. Selanjutnya dilansir dari bps.go.id jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 menyerukan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya selama 15 tahun ke depan. Tujuan ini secara eksplisit mengakui kemiskinan sebagai sebuah fenomena multidimensional dan menekankan pentingnya

peran sistem perlindungan sosial nasional dan *floor* sebagai instrumen utama untuk membantu mengentaskan kemiskinan. BPS telah mulai mengembangkan indikator nasional kemiskinan anak dan deprivasi multidimensional untuk membantu melacak kemajuan dalam pencapaian SDG 1.

- a. Proporsi masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 24 persen pada 1990 menjadi 11 persen pada tahun 2015. Di kalangan anak-anak, hampir 14 persen masih hidup di rumah tangga di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2015
- b. Banyak keluarga hidup dengan pendapatan yang hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan ambang batas kemiskinan nasional. Jika nilai garis kemiskinan nasional ditingkatkan dua kali lipat, akan terjadi kenaikan empat kali lipat pada tingkat kemiskinan anak nasional hingga 60 persen.
- c. Skema perlindungan sosial terfokus anak di Indonesia secara khusus menysasar anak usia sekolah. Skema-skema tersebut menjangkau sekitar 36 persen anak usia sekolah pada tahun 2015, sementara cakupannya kepada

anak di bawah usia 6 tahun masih di bawah 5 persen.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 bertujuan mencari solusi berkelanjutan untuk menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

- a. Lebih dari 37 persen anak di bawah usia 5 tahun mengalami *stunting* pada tahun 2013, yang sama dengan sebanyak 8,4 juta anak di seluruh Indonesia. Prevalensi *stunting* tinggi bahkan di kalangan anak-anak dari rumah tangga paling sejahtera.
- b. Beban ganda malnutrisi karenanya menjadi masalah yang semakin serius. Bagi Indonesia, hal ini merupakan tantangan aktif: pada tahun 2013, 12 persen anak di bawah usia 5 tahun terkena *wasting* (berat badan rendah dibandingkan tinggi badan), dan kurang lebih jumlah yang sama juga mengalami kelebihan berat badan (*overweight*).
- c. Anemia – salah satu masalah kekurangan gizi yang paling umum di seluruh dunia – mempengaruhi 23 persen perempuan berusia di atas 15 tahun dan 37 persen perempuan hamil.

d. Meskipun telah terdapat sejumlah kemajuan, jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan pada tahun 2015 masih di bawah setengah (45 persen) pada tahun 2015.

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, oleh karenanya keterlibatan pemerintah untuk memperkuat sektor ketahanan pangan dengan meningkatkan kemampuan rumah tangga tani, pekerja pertanian dan peningkatan kesejahteraan sehingga segenap anggota keluarganya mulai dari ayah, ibu dan anaknya menjadi lebih produktif dan lebih sejahtera, menjadi sangat penting. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama upaya peningkatan status gizi masyarakat yang paling erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, keluarga hingga perorangan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pangan perlu dilakukan evaluasi target capaian dalam bentuk

penyusunan capaian kinerja urusan pangan sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan dan Permenpan Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi, sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun panjang guna mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan daerah.

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam agenda pembangunan nasional karena: Pertama, akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia; Kedua, kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembenukan sumber daya manusia yang berkualitas; Ketiga, Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan ketersediaan pangan

yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan diutamakan berasal dari pangan lokal” (Pernyataan Eli Juartini selaku Plt. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Provinsi Banten, dilansir dari (<https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/171>)).

Ketahanan Pangan bukan semata perkara supply-demand pangan/urusan perut, tapi daya saing bangsa/urusan otak, gizi anak. Kekurangan gizi bisa menyebabkan

- a. Gagal Tumbuh, Berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus
- b. Hambatan perkembangan kognitif (nilai sekolah dan keberhasilan pendidikan)
- c. Menurunkan produktifitas pada usia dewasa
- d. Gangguan metabolic (lemak, karbohidrat, protein) sebagai resiko utama PTM (diabet tipe II, Stroke, Penyakit jantung, kanker dll) pada usia dewasa.

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah Gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Pemantauan Status gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi

dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk, prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017 (Disketapang Banten,2021). Stunting disebabkan oleh banyak faktor (a) Praktek pengasuhan yang tidak baik; (b) Terbatasnya layanan Kesehatan; (c) Kurangnya akses ke makanan bergizi dan (d) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Terdapat tiga komponen penanggulangan stunting yaitu (a) pola asuh; (b) pola makan dan (c) air bersih sanitasi.

Dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Pedoman Gizi Seimbang mempunyai 4 (empat) pilar yaitu (a) mengkonsumsi aneka ragam pangan (sesuai dengan kebutuhan gizi, karena tidak ada satupun pangan yang bernilai gizi lengkap; (b) membiasakan perilaku hidup bersih; (c) melakukan aktifitas fisik dan (d) memantau berat badan (BB) secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.

Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Tercapainya gizi seimbang dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan dan gizi. Umumnya kelompok usia remaja, merupakan periode rentan gizi karena peningkatan pertumbuhan fisik dan perkembangan yang pesat. Selain itu pada remaja dibutuhkan energy yang cukup untuk melakukan aktifitas fisik yang beragam.

Jika kebutuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tubuh, bahkan dapat menyebabkan tubuh kekurangan gizi dan mudah terkena penyakit.

Pemerintah Provinsi Banten berupaya meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui kegiatan edukasi dan literasi gizi, serta penerapan prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk perbaikan pangan dan status gizi, terutama pada remaja.

Peran Masyarakat Dalam meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Masyarakat harus mengetahui Dampak Konsumsi yang tidak seimbang/kurang Gizi:

- a. Lemah, daya tahan tubuh menurun, sering sakit
- b. Daya tahan produktifitas pendapatan menurun
- c. Prestasi belajar menurun
- d. Gangguan pertumbuhan/ perkembangan
- e. Rentan keguguran, pendarahan/ prematur

Masyarakat harus sadar tentang pentingnya pangan yang beragam, contoh pangan yang beragam yaitu (a) Pangan pokok harus kaya energi, rendah protein, kaya vitamin,mineral; (b) lauk pauk harus kaya protein rendah energi, kaya vitamin,mineral dan (c) Sayur dan Buah harus kaya vitamin dan mineral serta serat, rendah energi dan protein.

Pengertian HAM untuk pangan yang sekarang dikenal banyak terkait dengan *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996 yang ditanda tangani oleh 112 kepala negara atau pejabat tinggi dari 186 negara peserta, dimana Indonesia menjadi salah satu di antara penandatanganinya. Hal khusus terpenting dari Deklarasi tersebut di atas adalah pemberian tekanan pada hak atas pemenuhan

kebutuhan pangan secara cukup (*human right to adequate food*), dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan.

Pangan dan Gizi merupakan unsur yang penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk, termasuk bagi anak. Ketersediaan pangan berkaitan erat dengan lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan serta melibatkan partisipasi masyarakat yang terintegrasi, dimulai dari peran keluarga, peran ayah, peran ibu dan juga peran anak.

Desa Sindangsari di Kabupaten Serang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.410 jiwa yang bekerja dan berusia 27-40 tahun. Sementara selebihnya yaitu sebanyak 1.860 orang atau sebesar 35% adalah mereka yang berusia 20-26 tahun. Terdapat penduduk usia produktif yang memiliki pekerjaan, kemudian juga jumlah penduduk usia anak-anak, remaja atau orang tua yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu juga tipologi rumah tangga apakah keluarga kecil atau keluarga besar, jumlah anggota keluarga yang bekerja dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak bekerja akan berpengaruh terhadap

ketahanan pangan keluarga. Penelitian ini akan memfokuskan masalahnya pada “Bagaimana Ketahanan Pangan Berbasis *Role of Household Structure* di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang”

1.2 Urgensi Penelitian

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat masih menghadapi berbagai masalah pada tingkat makro maupun mikro. Analisis pengaruh mikro dapat dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumahtangga dalam memperoleh pangan yang cukup dalam hal jumlah, mutu dan ragamnya untuk memenuhi pangan dan gizinya sesuai dengan budaya setempat, baik yang berasal dari usaha tani sendiri maupun dengan membeli di pasar, sehingga anggota rumah tangga menjadi sehat dan mampu melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari (Kantor Menteri Pangan, 1995 dikutip oleh Darmawan, 2011:2). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran setiap anggota keluarga berdasarkan struktur atau kedudukannya (*the role of household structure*) sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai

anak, sebagai orang tua (kakek atau nenek) dan anggota keluarga lainnya dalam sebuah rumah tangga bersama, dalam lingkup keluarga kecil maupun besar, menjalankan peran dalam pemenuhan kebutuhan pangannya dan menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pola konsumsi pangan, ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga dan sebagainya, bagi para pemangku kepentingan misalnya Dinas atau Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dan Masyarakat Desa dan sebagainya.

1.3 Target Temuan

Dapat diketahui dan dianalisis peran masing-masing anggota rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta mengetahui dan menganalisis 3 (tiga) aspek dalam ketahanan pangan rumah tangga yaitu (a) ketersediaan dan distribusi pangan; (b) daya beli (*purchasing power*) rumah tangga untuk pangan dan (c) pengetahuan dan sosio-budaya yang membentuk kebiasaan makan (*food habit*)

sebuah rumah tangga (Sutrisno,1996; Suryana, et.al., 1996, Susanto, 1996 dalam Darmawan, 2011:2).

Adapun rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 1.1 sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS1	TS+1	TS+2
1.	Artikel Ilmiah dimuat di Jurnal	Nasional Terakreditasi	V				
		Nasional Tidak Terakreditasi		V			
2	Artikel ilmiah dimuat di prosidin	Internasional Terindeks		V			
		Nasional Terindeks		V			
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak Cipta	V				
4	Bahan Ajar				Draft	Editing	Proses Terbit

(Sumber: Peneliti, 2020)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Ketahanan Pangan

Dalam World Food Summit (1996) disebutkan bahwa *“food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”* (<http://www.fao.org/3/al936e/al936e.pdf>).

Ketahanan pangan atau *food security* dalam definisi yang disampaikan oleh Coleman-Jensen et al (2015) dalam Robert A. Moffitt & David C. Ribar (2017:2) adalah *“access by all people at all times to enough food for an active, healthy life”*.

Ketahanan pangan merupakan masalah yang krusial bagi suatu Negara. FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan merupakan situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak

beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Ketahanan Pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim).

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang No 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan keadaan terpenuhinya penyediaan pangan rumah tangga dengan melibatkan lintas sektor demi tercukupinya pangan baik dalam hal jumlah, akses, serta keamanan.

Arifin (2001:50), menjelaskan beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu Negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional atau regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi bahan pangan sampai pelosok rumah tangga pedesaan yang tentunya mencakup fungsi tempat, ruang, dan waktu juga tidak kalah penting dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan.

Ketersediaan dan kecukupan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standard kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Penyediaan pangan tentunya dapat ditempuh melalui: 1) produksi sendiri, dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya

manusia, serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal; 2) impor dari Negara lain, dengan menjaga perolehan devisa yang memadai dari sektor dan sub sektor perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan luar negeri.

Dalam ketahanan pangan atau aksesibilitas setiap individu terhadap bahan pangan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang juga dapat disempurnakan melalui kebijakan tata niaga, atau distribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai ke tangan konsumen. Akses individu ini dapat juga ditopang oleh intervensi kebijakan harga yang memadai, menguntungkan dan memuaskan berbagai pihak yang terlibat. Intervensi pemerintah dalam hal distribusi pangan pokok masih nampak relevan, terutama untuk melindungi produsen terhadap anjloknya harga produk pada musim panen, dan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga kebutuhan pokok pada musim tanam atau musim paceklik.

Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO)

menetapkan beberapa kriteria tentang ancaman ketahanan pangan suatu Negara. Kriteria itu antara lain: 1) tingginya proporsi penduduk yang kekurangan pangan; 2) tingginya proporsi kekurangan energi/protein dari rata-rata kebutuhan energi/protein yang diisyaratkan (*food gap*); 3) besarnya indeks gini dari *food gap* konsumsi energi/protein; dan; 4) besarnya koefisien variasi konsumsi /energi.

Ketahanan pangan memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sarana utama pembangunan dan sebagai salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi. Peran utama merupakan fungsi ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk keberlangsungan hidup yang sehat dan produktif. Peran kedua, merupakan implikasi dari fungsi ketahanan pangan sebagai syarat keharusan dalam pembangunan sumber daya manusia yang kreatif dan produktif yang merupakan determinan utama dari inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan tenaga kerja produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan juga memiliki fungsi sebagai

salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. Ketidaktahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan bukan masalah produksi dan ketersediaan semata. Kerawanan pangan terjadi di mana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumber daya ekonomi lainnya).

Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya jangkauan terhadap penguasaan lahan pertanian dan aset produktif lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang mendasar dalam ketahanan pangan adalah keterjangkauan pangan oleh rumah tangga dan masalah keberlanjutan dari penyediaan pangan. Keterjangkauan pangan oleh keluarga ditentukan oleh tingkat pendapatan dan harga pangan. Keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan dan stabilitas produksi pangan dalam negeri dan kemampuan pembiayaan untuk mengimpor serta keadaan penyediaan pangan di pasar internasional. Ketahanan pangan dapat terwujud apabila semua aspek

yang terkait dengan hal-hal yang mendukung ketahanan pangan bekerja sesuai dengan sistem dan fungsinya.

2.1.1 Sub Sistem Ketahanan Pangan

Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Secara rinci penjelasan mengenai sub sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sub sistem ketersediaan (*food availability*): yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu Negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan

maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

2. Akses pangan (*food access*): yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian atau pun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.
3. Penyerapan pangan (*food utilization*) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan

kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan.

4. Stabilitas (*stability*) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (*chronic food insecurity*) dan kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial.
5. Status gizi (*Nutritional status*) adalah outcome ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya status gizi ini diukur dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

Secara umum (Baliwaty, 2004) ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu:

1. Kecukupan (*sufficiency*),
2. Akses (*access*),
3. Keterjaminan (*security*), dan
4. Waktu (*time*)

Dengan adanya aspek tersebut maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability dan stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan.

Asumsi lain diungkapkan oleh Riely et.al bahwa masalah ketahanan pangan berfokus pada tiga hal yaitu:

1. Ketersediaan pangan (*Food Availability*). Ketersediaan pangan dicapai pada saat kecukupan kuantitas pangan tersedia bagi seluruh individu secara konsisten di seluruh wilayah negeri.
2. Keterjangkauan pangan (*Food Access*). Hal ini dipastikan terpenuhi secara efektif ketika rumah tangga atau seluruh individunya mempunyai sumber daya yang cukup yang memperoleh pangan sewajarnya dan bergizi.
3. Pemanfaatan pangan (*Food Utilization*). Pemanfaatan ini bergantung pada ukuran pemahaman pengetahuan dari rumah tangga dalam hal penyimpanan pangan dan teknik pengolahan serta prinsip dasar kandungan

gizi pangan dan perawatan anak yang tepat, serta pencegahan penyakit.

Dari beberapa sub sistem ketahanan pangan yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan mencakup tiga hal, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

2.2 Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Dalam UUD 1945 mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan jaminan kepada warga negara agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin antara lain tersurat pada pasal 28 A ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-2 yang menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan”. Undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Indikator ketahanan pangan rumahtangga dicerminkan dari (1) stabilitas pasokan pangan yakni distribusi musiman ketersediaan pangan

pangan pokok (*staple food*); (2) ketersediaan yang ditentukan oleh jumlah pangan hasil usaha tani yang dijual di pasar dan dikonsumsi sendiri serta yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan (3) aksesibilitas pangan rumah tangga yang ditentukan oleh daya beli rumah tangga tersebut. (dalam Darmawan, 2011:2).

2.3 Pengertian Peran (*Role*)

Menurut Martin Beres (2011) dalam artikelnya yang berjudul *Role Theory in the Social Work in the Context of Gender Stereotype* menyatakan bahwa peran menyajikan hubungan antara realitas obyektif lembaga yang dibangun secara realitas subyektif oleh individu. Elemen sentral dari realitas sosial di sini adalah identitas, yang dibentuk oleh interaksi organisme biologis, kesadaran individu dan struktur sosial. Masyarakat dan identitas sosial saling menciptakan hubungan dialektik. Peran sosial adalah tipikasi dari apa yang bisa terjadi dari aktor individu dalam situasi sosial tertentu. (Beres, 2011:180). P. L. Berger dan T. Luckmann (1999) menyampaikan tentang definisi peran dari berbagai perspektif yaitu 1) *acting* (tipe

aktor sesuai dengan konteks yang ada), 2) *institutions* (kedudukan dalam institusi) 3) *language* (peran yang merepresentasikan lingkungan bahasa sesuai konteks lingkungan), 4) *knowledge* (peran berkaitan dengan representasi dan menyediakan tujuan obyektif sesuai dengan kluster pengetahuan) 5) *sectors of knowledge* (peran yang berkenaan dengan mediasi antara sektor-sektor yang lebih spesifik berkaitan dengan dasar pengetahuan atau *roles mediating between specific sectors of common knowledge base*), 6) *multiple roles* atau peran ganda (yang berkenaan dengan definisi dalam pengetahuan atau *attachment of knowledge*) (menurut Hubik, 1999:185).

Pengertian Peran (*Role*) biasanya didefinisikan sebagai serangkaian tingkah laku atau fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan posisi khusus dalam hubungan tertentu. Menurut Bidle & Thomas (Wibowo, 2000:1.21) ada 4 (empat) istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:

- a. Harapan (*expectation*).
- b. Norma (*norm*).
- c. Wujud Perilaku (*performance*).
- d. Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*sanction*).

Dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Harapan tentang Peran, adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh harapan dari masyarakat umum terhadap *public servant* yang bersih dan bebas KKN.
- b. Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Menurut Secord & Backman (Wibowo, 2000:1.21-1.22) jenis-jenis harapan adalah:
 - Harapan yang bersifat meramalkan (*predicted role expectation*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
 - Harapan Normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Ada 2 jenis yaitu pertama harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan-harapan yang ada tanpa harus diucapkan misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya. Kedua yaitu harapan terbuka (*overt*) adalah harapan-harapan yang diucapkan (*role demand*). Misalnya orang tua yang meminta

agar anaknya rajin belajar dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya.

c. Wujud Perilaku dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah adalah mendisiplinkan anaknya, maka ada ayah yang menggunakan hukuman-hukuman fisik sedangkan ayah lainnya hanya memberi nasehat saja. Kapan peran perlu ditunjukkan/menjadi penting? Perwujudan peran bisa bermacam-macam. Misalnya pendapat Sarbin (dalam Wibowo, 2000:1.23) dimana perwujudan peran terdiri dari tingkatan intensitas dari yang terendah sampai yang tertinggi. Contoh seorang pemain musik di kafe yang menjadi tugasnya setiap malam maka karena terlalu biasa ia bisa bermusik sambil mengobrol dengan temannya. Sementara ada seorang pianis yang harus menggelar konser tunggalnya maka ia akan mempersiapkan diri dan performanya dengan penuh konsentrasi. Goffman (dalam Wibowo, 2000:1.23) meninjau dari sudut lain yaitu dari permukaan (*front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus

agar orang mengetahui secara jelas peran si pelaku. Contoh seorang profesor akan memajang rak penuh buku-buku ilmiah di ruang tamu, sehingga tamunya akan mendapat kesan tentang apa dan bagaimana peran profesor tersebut. Inilah yang dimaksud dengan “*front*”. Namun ada juga hal yang disukai profesor misalnya tetapi tidak ditunjukkan yaitu kegemarannya membaca komik dimana komik-komik tersebut disimpannya dengan rapi di kamar pribadinya.

- d. Penilaian dan Sanksi. Menurut Biddle & Thomas (dalam Wibowo, 2000:1.24) penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Menurut Merton & Kitt (dalam Wibowo, 2000: 1.25) setiap orang memerlukan kelompok rujukan (*reference group*) tertentu yang mempunyai fungsi, pertama *fungsi normatif*, dimana kelompok mendesakkan suatu

standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan atau kepercayaan anggotanya. Terlepas benar atau salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu sehingga individu mau tidak mau mengikuti standar tersebut. Misalnya aturan-aturan yang dibuat orang tua harus diikuti anaknya karena anak adalah anggota keluarga. Jika norma ini diserap (diinternalisasikan) maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu yang selanjutnya menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaannya. Kedua adalah *fungsi komparatif/perbandingan* dimana kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah. Perbandingan ini bisa dilakukan dengan melibatkan diri atau tidak terhadap kelompok tersebut. Kelompok hanya dijadikan alat untuk tujuan informatif saja.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Yeni Widyastuti dan Listyaningsih (2018) yang berjudul *Interpersonal Integrated Strategy* dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga di Kecamatan

Curug Kota Serang tahun 2018. Model pemberdayaan petani dengan strategi yang terintegrasi dan diterapkan untuk seluruh anggota keluarga petani (*interpersonal integrated strategy*) merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang memaksimalkan potensi lahan pekarangan dan dikelola melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dan salah satu bagian kegiatan KRPL yaitu kebun sekolah yang melibatkan anak-anak serta program bantuan yang diberikan untuk Kelompok Tani (Poktan) yang beranggotakan para kepala keluarga (laki-laki), merupakan contoh program yang saling terintegrasi dan melibatkan peran seluruh anggota keluarga yaitu ayah, ibu dan anak-anak. Hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Curug, Kota Serang menunjukkan bahwa masing-masing anggota keluarga merasakan keterlibatan serta manfaat berupa ketersediaan cadangan pangan keluarga, jenis pangan yang bergizi dan beragam, tambahan penghasilan keluarga, serta manfaat ekonomis lainnya.

BAB 3

METODE PENELITIAN DAN ROAD MAP PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menganalisis Ketahanan Pangan Berbasis *Role of Household Structure* di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

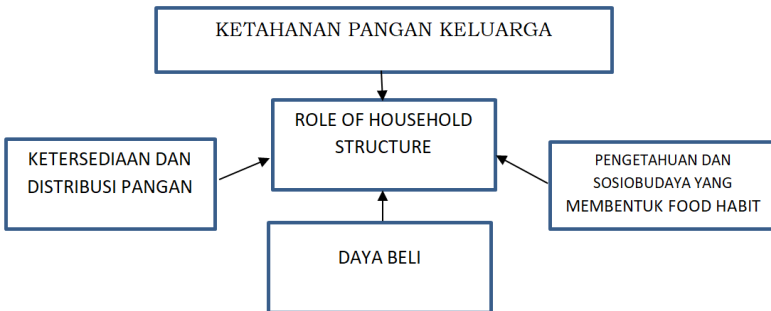
1. Wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kondisi faktual yang berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Dokumentasi, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

Informan Penelitian ini adalah:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Serang sebagai *Key Informan*
2. Kepala Desa Sindangsari sebagai *Secondary Informan*
3. Rumah Tangga Miskin di Desa Sindangsari sebagai *Secondary Informan*
4. Rumah Tangga dengan anggota keluarga yang bekerja di *Secondary Informan*.

3.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Adapun Kerangka Berpikir Penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Penelitian

3.4. Instrumen Penelitian

Dilihat dari pendekatan penelitian yang digunakan, instrumen penelitian yang

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistik.

3.3 Analisis Data

Adapun data yang digunakan untuk analisis adalah pertama, data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan dan observasi. Data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Hal ini berarti membandingkan dan mengecek

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini metode triangulasi dilakukan peneliti yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dapat dilaksanakan dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dipilah dan dipilih berdasarkan data yang disajikan, dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik. Sedangkan triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan adakah konsistensi, jika berbeda dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Sugiyono, 2005 dalam Fuad & Nugroho, 2014:19-20).

BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

4.1. Deskripsi Desa Sindangsari

Kondisi Geografis Desa Sindangsari. Desa Sindangsari adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, secara demografis, Desa Sindang Sari berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Sindangheula Karundang Kecamatan Cipocok jaya
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Kemanisan
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan curug
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Sindangheula

Letak Desa Sindangsari sangat strategis karena tidak jauh dari pusat pemerintahan. Jarak Desa Sindangsari dari Pusat Pemerintahan atau Orbitasi adalah sebagai

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan: 6 Km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota Administratif: 2 Km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten Serang: 7 Km
- d. Jarak dari Ibukota Propinsi Banten: 3 Km
- e. Jarak dari Ibukota Negara: 111 Km

Luas wilayah Desa Sindangsari adalah 774 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Pemukiman: 306 Ha
- b. Perkantoran: 10 Ha
- c. Pertanian: 150 Ha
- d. Perkebunan: 138 Ha
- e. Peternakan: 20 Ha

Berdasarkan Topografis, secara umum keadaan Desa Sindangsari merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 600 (enam ratus) meter diatas permukaan laut. Mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

4.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Sindangsari pada tahun 2019 adalah sebanyak 13.537 jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki

sebanyak 6.337 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7.201 jiwa.



Gambar 4.1

Diagram Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Profil Desa Sindangsari 2019

Penyebaran penduduk Desa Sindagsari berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan diagram diatas 50% penduduk atau seabnayk 1.238 berpendidikan sampai dengan jenjang Sekolah Dasar, 29% atau 731 penduduk berpendidikan setingkat SLTP, 19% berpendidikan setingkat SLTA dan sebanyak 2% atau 55 orang berpendidikan SLTA. Sementara itu gambaran penduduk berdasarkan usia kerja, dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 4.3
Komposisi Penduduk Usia Kerja

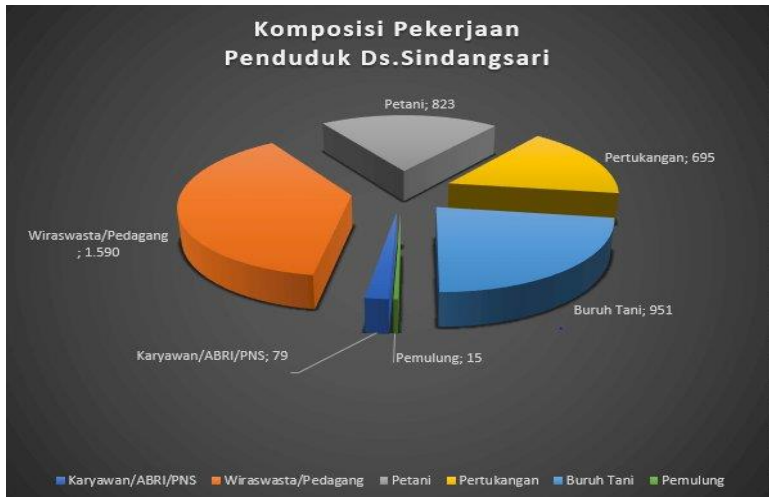
Berdasarkan diagram diatas 65% atau sebanyak 3.410 penduduk yang bekerja adalah berusia 27-40 tahun. Sementara selebihnya yaitu sebanyak 1.860 orang atau sebesar 35% adalah mereka yang berusia 20-26 tahun. Pendidikan adalah penting bagi masyarakat, karena pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, trampil dan inovatif. Sebaran penduduk berdasarkan usia di desa Sindangsari adalah sebagai berikut



Gambar 4.4
Komposisi Penduduk Usia Sekolah

Berdasarkan pada diagram diatas maka diketahui bahwa 49 % atau sebanyak 2.367 orang adalah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sebanyak 39% atau 1.850 orang adalah penduduk usia sekolah 13-15 tahun, dan sebanyak 12% atau 589 orang adalah penduduk usia sekolah 4-6 tahun. Jika dihubungkan dengan penyebaran virus corona maka resiko terjadinya penyebaran virus corona adalah di lingkungan sekolah dasar. Oleh karena itu kebijakan dihilangkannya sementara

pembelajaran tatap muka merupakan salah satu upaya pencegahan tersebarnya COVID-19. .



Gambar 4.5
Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pada grafik diatas sebagian besar penduduk Desa Sindangsari adalah pedagang dan wirastawan, selanjutnya buruh tani sebanyak 951 orang, Petani 823 orang, Tukang kayu, Batu dan Kuli Bangunan sebanyak 659 orang, Karyawan/ABRI PNS sebanyak 79 orang dan juga terdapat 15 orang pemulung.

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Ketersediaan dan Distribusi Pangan

5.1.1 Ketersediaan Pangan

Merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat pada tanggal 1 Maret 2021, Provinsi Banten menempati posisi sembilan (9) besar produsen beras secara Nasional tahun 2020. Dengan luas panen 325.333 ha, Provinsi Banten mampu menghasilkan padi 1.655.170 ton GKG (Gabah Kering Giling) atau setara 937.815 ton beras (tangerangkab.go.id.2021).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKKP) melaunching Pasar Mitra Tani (PTM) atau Toko Tani Indonesia Center Daerah (TTICD) di Gedung DKPP pada Kamis, 1 Juli 2021. PTM sebagai upaya Pemkab Serang dalam rangka memfasilitasi distribusi dan pemasaran hasil pertanian dari gabungan kelompok tani atau kelompok tani (Gapoktan/Poktan). Upaya ini adalah untuk menyambungkan antara produsen dengan konsumen jika dalam kondisi pandemi

produsen susah untuk memasarkan, konsumen pun susah untuk mencari bahan yang masih segar dan harga terjangkau. Dibukanya Pasar Mitra Tani (PMT) juga sebagai upaya Pemkab Serang supaya terjadi keuntungan kedua pihak baik produsen, petani, kelompok tani dan juga konsumen yakni untuk masyarakat Kabupaten Serang dan sekitarnya. Pasar Mitra Tani menyiapkan sepuluh bahan pokok meliputi bawang merah, cabe keriting, cabe hijau, sayur-sayuran, telur, daging, dan kue olahan. PMT berfungsi sebagai distribution centre melakukan aktivitas penyakuran pangan langsung kepada konsumen ataupun melalui Toko Mitra Tani (TMT) dengan memangkas rantai pasok pangan khususnya untuk sepuluh pangan pokok dan strategis (serangkab.go.id.2021).

Ketersediaan pangan diartikan sebagai kemampuan rumah tangga menyediakan pangan melalui berbagai cara, antara lain dengan memproduksi pangan sendiri di lahan pertanian/perkebunan sendiri dan membeli pasar terdekat.

Ketersediaan Pangan di Desa Sindangsari terpenuhi melalui 3 cara :

1. Memenuhi kebutuhan sendiri dengan menanam bahan pangan.

Desa Sindangsari desa yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian di Desa Sindangsari sudah tidak terlalu luas, karena banyak lahan yang beralih fungsi menjadi perumahan, sehingga kebutuhan beras masyarakat di Desa Sindangsari tidak dapat ditopang dari hasil pertanian desa ini. Sebagian besar masyarakat menanam lahan ladang dan kebun mereka dengan menanam ubi kayu, ubi jalar, kacang Panjang, timun, timun suri (musiman) serta tanaman buah seperti kecap, rambutan, mangga, kelapa dan tanaman keras seperti pohon petai, pohon jengkol, pohon nangka, bambu, Albasia dan jati. Di Sindangsari juga terdapat peternakan ayam dan empang ikan tawar. Selain itu seperti desa-desa lainnya rata-rata warga desa memiliki peliharaan ayam atau bebek yang biasanya akan mereka potong di hari-hari raya islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Hasil ladang dan kebun masyarakat di desa Sindangsari Sebagian dijual ke Pasar Ciomas dan pasar Baros ada

juga yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Hasil jualan mereka akan dibelikan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, bumbu-bumbu dan lain-lain.

Pada dasarnya ketersediaan pangan yang berasal dari hasil lokal desa yang bukan merupakan makanan pokok seperti ubi kayu, ubi jalan, buah-buahan, petai dan lain-lain cukup tersedia, bahkan berlebih untuk konsumsi local desa tersebut oleh karenanya masyarakat menjualnya keluar desa.

2. Membeli dari beberapa pasar, warung sayuran dan kelontong dan penjual sayur keliling.

Kebutuhan masyarakat akan makanan pokok beras di Desa Sindangsari belum dapat sepenuhnya terpenuhi juga sayur-sayuran bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, ketumbar, minyak goren dan kebutuhan memasak lainnya, oleh karena itu masyarakat membelinya dari warung dan toko yang ada di sekitar desa dan beberapa pasar tradisional, seperti pasar Ciomas, pasar Baros dan Pasar Rau Serang. Bagi masyarakat yang memeili anak usia balita mereka mencoba mencukupi

kebutuhan susu dengan membelinya di minimarket.

3. Bantuan Pemerintah dalam Berbagai Program.

Penyediaan makanan yang bergizi bagi Balita, Ibu Hamil dan Lanjut Usia diberikan dalam Program Makanan Tambahan (PMT) yang dikelola oleh Posyandu. Pemerintah Desa juga menyediakan anggaran khusus untuk penanganan stunting dan anak-anak dengan berat badan rendah yang bersal dari dana desa. Jumlah dana yang disediakan adalah sebesar kurang lebih 30 juta rupiah untuk 40 kasus.

5.1.2. Distribusi Pangan

Distribusi adalah penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu distribusi pangan diartikan sebagai proses penyaluran hasil pangan dari produsen ke konsumen. Distribusi pangan disini memiliki makna distribusi keluar desa Sindangsari dan Distribusi menuju desa Singangsari, karena masyarakat Desa Sindangsari ada yang menjadi produsen dari

hasil kebun dan juga sebagai konsumen untuk kebutuhan pangan lain.

1. Distribusi Pangan Keluar Desa Sindangsari

Terdapat beberapa faktor yang menentukan distribusi pangan antara lain sarana transportasi, prasarana jalan dan jarak lokasi produsen dengan konsumen. Jika dilihat dari sarana transportasi, tersedia angkutan umum dengan jalur trayek Palima – Padarincang yang beroperasi sampai pukul 18.00 WIB, sehingga mobilitas masyarakat Desa Sindangsari untuk membeli kebutuhan pangan mereka jika tidak memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan angkutan pedesaan sampai pukul 18.00. Tetapi pada saat ini hamper seluruh keluarga di desa Sindangsari memiliki motor sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil panen mereka.

Faktor kedua adalah prasarana jalan. Desa Sindangsari dilalui jalan utama provinsi yang menghubungkan Kota Serang dengan beberapa kecamatan di kabupaten Serang, yaitu kecamatan Pabuaran, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Padarincang dan Kecamatan Cinangka. Kondisi jalan provinsi

ini dapat dikatakan dalam kondisi baik, hanya beberapa area saja yang berlubang. Tetapi jalan desa masih banyak yang berbatu, seperti jalab menuju kantor kelurahan Sindangsari. Dengan kondisi jalan ini, maka bagi masyarakat yang memang tinggal di wilayah dekat dengan jalan utama tentunya tidak menjadi kendala jika akan mendistribusikan hasil panennya. Tetapi bagi masyarakat desa yang tinggal di kampung yang terpencil, tentu saja kondisi jalan menghambat distribusi hasil panen mereka.

Faktor selanjutnya adalah jarak, jarak desa Sindangheula dengan kota dan Pasar terbilang tidak terlalu jauh, pasar terdekat dengan desa Sindangsari adalah Pasar Ciomas, berikutnya pasar Rau. Akses ke dan menuju Pasar Ciomas cukup sekali menggunakan angkutann Kota, tetapi akses menuju dan dari Pasar Baros dan Pasar Rau menggunakan dua kali naik angkutan. Jarak yang dekat dengan pusat pemerintahan provinsi Banten memudahkan masyarakat memasarkan hasil panennya tanpa membutuhkan waktu yang lama.

2. Distribusi Pangan Menuju Desa Sindangsari

Distribusi pangan menuju Desa Sindangsari dapat dikatakan sudah cukup baik bahkan berlimpah. Tidak ada kendala yang berarti dalam mendistribusikan kebutuhan pangan sehari-hari untuk masyarakat desa Sindangsari. Distribusi pangan dari luar desa Sindangsari dilakukan oleh perusahaan distributor produk makanan dan minuman serta bahan-bahan kebutuhan rumah tangga. Selain terdapat distributor, distribusi menuju desa Sindangsari dilakukan oleh masyarakat yang memang berprofesi sebagai pedagang sembako, pedagang sayur permanen dan pedagang sayur dan ikan keliling.

5.2. Daya Beli Rumah tangga untuk Pangan

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel (dikutip dari Indeks Ketahanan Pangan 2020 yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi

pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo,1996; Azwar,2004) dan makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (deaton & Muelbauer,1980). Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Serang adalah 77,95 dan berada di peringkat 153 dari 416 kabupaten di Indonesia (Badan Ketahanan Pangan, 2019)

Konsumsi pangan merupakan kegiatan mendasar dan perilaku utama bagi pemenuhan kebutuhan dasar individu dan rumah tangga. Pola konsumsi pangan tercermin dalam kecukupan jumlah (kuantitas) dan kualitas pangan yang selanjutnya akan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan status Kesehatan, status gizi maupun status kemiskinan. Menurut Nicolson (1995) dalam Siti Rohima & Suhel (2015:133-134). Kemiskinan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar baik pangan maupun non-pangan. Besarnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat

dijadikan sebagai indikator kemiskinan Rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi pangan mengindikasikan rumah tangga tersebut adalah rumah tangga miskin (Sealee.et.al., 2003).

Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah dan sebagai dampaknya maka harus dibuat pilihan dimana pemenuhan kebutuhan dasar yang satu mengalahkan kebutuhan dasar yang lainnya. Daya beli dalam rumah tangga dilihat dari dua perspektif yaitu daya beli atau pengeluaran untuk pangan dan non pangan dalam satu bulan dibagi jumlah anggota keluarga. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan.

- a. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa.
- b. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara

dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Pendapatan rumah tangga petani berkaitan dengan fluktuasi produksi tanaman pangan yang timbul dari ketidakpastian iklim, sumber daya dan factor teknis misalnya kondisi biologis, kimia, mekanis dan pemilihan tanaman (dalapetani di pedesaan secara simultan (Darmawan, 2011:21). Rumah tangga petani di pedesaan secara simultan menderita karena semakin naiknya harga pangan dan turunnya pendapatan. Secara historis kebijakan ketahanan pangan adalah dalam rangka memenuhi permintaan pangan masyarakat perkotaan. Pemerintah mengalami kesulitan memberikan tambahan pendapatan (*income supplement*) yang memadai kepada rumahtangga pedesaan atau meningkatkan daya beli (*purchasing power*) pada saat kegagalan panen (dalam Darmawan, 2011:21).

Salah satu bentuk *income supplement* yang ditujukan untuk meningkatkan *purchasing power* rumah tangga di pedesaan adalah dengan penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan

dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa antara lain adalah:

1. Penguatan ketahanan pangan
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan untuk ketahanan pangan,
 - b. Pembangunan lumbung pangan desa;
 - c. Pengolahan pasca panen, dan
 - d. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pencegahan stunting di Desa
 - a. Kesehatan ibu dan anak;
 - b. Konseling gizi;
 - c. Air bersih dan sanitasi;
 - d. Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan

Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tim peneliti dengan Sekdes Desa Sindangsari disampaikan bahwa untuk penguatan ketahanan pangan, sesuai tujuan penggunaan dana desa yaitu pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan, telah dikembangkan lahan berupa tanah bengkok atau tanah milik desa yang selama ini hanya sebagai lahan tidur seluas 3000 m² yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk menanam sayuran dan dibuat budidaya ikan benur yang dilakukan oleh karang taruna desa setempat. Selain itu warga masyarakat juga aktif dalam kelompok tani dimana salah satu kelompok tani (poktan) Desa Sindangsari yaitu Kelompok Tani Berkah Mandiri menjadi salah satu Poktan percontohan di Kabupaten Serang.

Sedangkan untuk pencegahan stunting telah dibentuk Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Sindangsari. sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Berdasarkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, telah ditetapkan bahwa Dana Desa diprioritaskan salah satunya untuk meningkatkan layanan kesehatan di Desa. Wujud nyata dari upaya pembangunan kesehatan di Desa adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memfasilitasi terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS). RDS berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan di Desa, pusat informasi kesehatan di Desa, dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan. (Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat,2018). Pembentukan dan pengembangan RDS, utamanya di Desa yang menjadi lokasi konvergensi pencegahan stunting.

Dikutip dari Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat yang dikeluarkan oleh Kementerian PDDT, tujuan Umum RDS ini adalah meningkatkan peran RDS untuk mewujudkan konvergensi layanan kesehatan di Desa, utamanya konvergensi pencegahan stunting di Desa.

Sedangkan, tujuan khusus adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk RDS pada setiap Desa di kabupaten/kota lokasi prioritas pencegahan stunting.
- b. Mendayagunakan RDS sebagai Sekretariat Bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di Desa khususnya yang bergerak di bidang kesehatan untuk mempercepat konvergensi pencegahan stunting.
- c. Mendayagunakan RDS sebagai pusat pembelajaran masyarakat berkaitan dengan urusan kesehatan, pusat informasi Kesehatan dan forum bersama untuk mengadvokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan.
- d. Mendayagunakan RDS sebagai wahana pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia (KPM)

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Sekdes Sindangsari, alokasi dana desa yang disediakan dalam RDS ini adaah 30 (tiga puluh) juta rupiah yang diperuntukkan untuk penyiapan makanan bergizi bagi kurang lebih 40 (empat) puluh penderita stunting, meskipun di

Desa Sindangsari sendiri saat ini memiliki 6 kasus stunting. Bentuk bantuan dalam RDS ini adalah berupa makanan siap saji dan bahan makanan bergizi lainnya, yang diagendakan satu kali dalam sebulan (wawancara di Kantor Desa Sindangsari, 12 Agustus 2021).

Selain itu juga terdapat program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan sumber dana dari APBN sebesar 180 juta per tahun yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang dikoordinir penyelenggaraannya oleh Posyandu.

Beberapa program pemerintah tersebut (RDS dan PMT) yang sifatnya adalah sebagai income supplement bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga di pedesaan, tidak banyak berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga, namun mempengaruhi konsumsi pangan dan gizi secara umum. Timmer et.al (1963) dalam Darmawan (2011:23) menggambarkan hubungan antara berbagai ukuran konsumsi pangan dan tingkat pendapatan rumah tangga sebagai perbedaan kuantitas dan kualitas pangan. Monteverde (1987) mengilustrasikan, penyesuaian pola konsumsi pangan sebagai fungsi dari pendapatan.

Maknanya adalah dengan adanya income supplement yang diluncurkan pemerintah setidaknya membantu memenuhi kecukupan konsumsi kalori dan protein untuk makanan jadi, yang dapat mengurangi beban pendapatan keluarga atau rumah tangga dan dapat disubstitusi untuk kebutuhan non-pangan. Contohnya dengan adanya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maka beban pemenuhan pangan ibu dan anak berkurang dan dapat dialihkan untuk biaya lainnya misalnya biaya kesehatan.

Konsumsi pangan merupakan salah satu komponen dari system pangan dan gizi terkait dengan pendapatan di damping komponen-komponen lain seperti produksi pangan, ketersediaan dan distribusi, pengetahuan gizi dan kebiasaan makan (Sohardjo,1994 dalam Darmawan 2011:24).

Dalam konteks *purchasing power* atau daya beli masyarakat untuk pangan di Desa Sindangsari pada umumnya tercukupi kebutuhan pangannya dan latar belakang pekerjaan penduduk sudah banyak yang beralih dari petani menjadi pekerja di sektor non pertanian di daerah-daerah sekitarnya seperti di

Jakarta dan Tangerang, misalnya berdagang atau bekerja di bidang industri. Kemudian untuk pencari nafkah dalam keluarga besar umumnya lebih dari satu orang. Berdasarkan wawancara dengan Sekdes Sindangsari, disampaikan ada sebuah keluarga yang ayahnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak dari pandemic COVID-19 namun anaknya masih memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya. Di Desa Sindangsari tipe keluarga besar umumnya hanya memiliki satu Kartu Keluarga (KK) dan tinggal dalam satu rumah yang sama dengan orang tuanya, meskipun anak-anaknya telah menikah. Jadi dalam satu KK terdapat beberapa KK (wawancara di kantor Desa Sindangsari, 12 Agustus 2021). Hal ini berdampak pada kondisi jika salah satu kepala keluarga sebagai pencari nafkah terkendala dalam pekerjaannya maka masih ada pencari nafkah lainnya, sehingga kebutuhan pangan rumah tangga masih dapat terpenuhi.

Pendapatan rumah tangga untuk keluarga petani dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi baru dalam pertanian. Pemerintah

Provinsi Banten dalam hal ini membantu memfasilitasi pemberian *hand tractor* gratis bagi 120 kelompok tani yang dilakukan langsung oleh Gubernur Banten bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang dilakukan juga sebagai bentuk apresiasi karena Provinsi Banten termasuk dalam sepuluh besar kategori provinsi sebagai produsen beras tingkat nasional tahun 2020 dan berada di peringkat 9 (tangerangkab.go.id.2021). Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyerahkan bantuan 120 hand traktor kepada Kelompok Tani yang tersebar di empat (4) Kabupaten dan satu (1) Kota. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Agus M. Tauchid kepada perwakilan Kelompok Tani di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Drangong, Kota Serang (Rabu, 23/6/2031). Dari 120 Kelompok Tani (Poktan) yang mendapat bantuan ini tersebar di Kabupaten Lebak sebanyak 34 Poktan, Kabupaten Pandeglang 33 Poktan, Kabupaten Serang 31 Poktan, Kabupaten Tangerang 18 Poktan, serta Kota Serang sebanyak 4 Poktan. Dengan bantuan hand tractor ini diharapkan para petani dapat melakukan perbaikan dalam budidaya usaha taninya dan

dapat meningkatkan pula ketersediaan pangan yang bergizi dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Konsumsi gizi (energi, protein, vitamin A dan zat besi) rumah tangga dipengaruhi juga oleh pemanfaatan pekarangan dan non-pekarangan, jumlah anggota keluarga serta kondisi wilayah, dimana di Desa Sindangsari ini untuk pemenuhan pangan rumah tangganya Sebagian warga masyarakat meang masih menanam sendiri kebutuhan untuk sayur-mayur juga pemanfaatan pekarangan untuk mencukupi kebutuhan protein dengan budidaya ikan.

Posisi tingkat pendapatan sangat penting dalam system pangan dan gizi. Menurut Harper et.al (1986) tingkat pendapatan (bersama dengan tingkat Pendidikan) menentukan ketersediaan dan penggunaan pangan maupun status gizi anggota keluarga. Ketersediaan pangan yang cukup di pasar tidak akan berarti bagi rumah tangga yang daya belinya lemah karena pendapatannya rendah (dalam Darmawan 2011:24).

5.3. Kebiasaan Makan (*Food Habit*)

Ketahanan pangan rumah tangga dari aspek pengetahuan dan sosio-budaya (*value system*) mengandung makna suatu kondisi rumah tangga yang tidak mengalami rawan pangan, dan hal ini dapat terjadi karena rumah tangga yang bersangkutan mempunyai pengetahuan untuk menghadapi berbagai kondisi yang cenderung mengancam ketersediaan pangan dan keseimbangan gizi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kurangnya pengetahuan gizi atau penerapan dalam informasi sehari-hari bisa menyebabkan gangguan kurang gizi. Status ekonomi yang tinggi belum menjamin tercapainya keadaan gizi yang baik bila kurang pandai memperoleh, memilih, menyimpan mengolah makanan yang baik, murah dan bergizi (Suryanathan,1997 dalam Darmawan, 2011:25).

Terkait pengetahuan gizi di Desa Sindangsari, masyarakatnya secara umum sudah memiliki pengetahuan gizi yang cukup dimana tidak ada kasus kekurangan gizi atau malnutrini yang terjadi pada usia anak maupun dewasa, kemudian kasus stunting juga hanya ada 6 (enam) kasus dan sudah diantisipasi

dengan penggunaan dana desa melalui Rumah Desa Sehat (RDS) dan juga pemberian makanan tambahan bagi ibu, bayi dan balita melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bersumber dari dana APBN dengan pengelolaan dari Posyandu. Beberapa penelitian terdahulu di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatra Utara (Susanto,1996) menunjukkan bahwa pengetahuan kepala keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi pangan yang selanjutnya berdampak pada ketahanan pangan keluarga termasuk makanan alternatif dalam situasi rawan pangan seperti kasus di Gunung Kidul, DIY.

Selain itu juga ada fungsi-fungsi sosial pangan seperti identitas budaya, religi dan magis, komunikasi, lambing status serta kekuatan atau kekuasaan, yang akhirnya mempengaruhi kebiasaan makan (food habit) dalam rumah tangga (Susanto,1996 dalam Darmawan, 2011:26). Dalam masyarakat memang ada beberapa system nilai yang hidup berkenaan dengan makanan yang sehat, aman dan halal, namun di sisi lain terkadang hal tersebut belum memenuhi kriteria pola gizi seimbang.

Pemerintah menetapkan Permenkes Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi.

Keanekaragaman pangan adalah aneka-ragam kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan dan air serta beranekaragam dalam setiap kelompok pangan. Berbagai makanan yang dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah) maupun dalam setiap kelompok pangan. Masing-masing contoh jenis pangan dari berbagai kelompok pangan adalah sebagai berikut:

- a. Makanan pokok antara lain: Beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, talas, sagu, sukun.

- b. Lauk pauk sumber protein antara lain: Ikan, telur, unggas, daging, susu dan kacang-kacangan serta hasil olahannya (tahu dan tempe).

Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari 4 (empat) Pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Empat pilar gizi seimbang adalah :

- a. Mengonsumsi aneka ragam pangan
- b. Perilaku hidup bersih: salah satu contoh dalam keadaan infeksi nafsu makan akan menurun maka jika asupan pangan turun kandungan gizi juga berkurang dan akan mempengaruhi daya tahan tubuh
- c. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh.
- d. Memantau Berat Badan (BB) secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal

Pengetahuan gizi (*food knowledge*) akan berpengaruh pada (a) produksi pangan untuk

keperluan rumah tangga; (b) konsumsi pangan sehar-hari; (c) pengeluaran uang untuk pangan rumah tangga (Harper. et.al., 1986; Timmer et.al.1983, Timmer.1992 dalam Darmawan 2011:26). Pengetahuan tentang makanan yang beragam serta manfaatnya bagi kehidupan yang sehat belum banyak dipahami dan dimiliki oleh rumah tangga pada umumnya. Selain itu mereka yang telah memahami dan memilikinya masih banyak yang belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena kuatnya food habit yang belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Diversifikasi produk pangan yang dipengaruhi oleh pengetahuan gizi dan kebiasaan makan, selanjutnya akan menentukan distribusi dan ketersediaan pangan dan tingkat pendapatan atau daya beli rumah tangga (Darmawan, 2011:27).

Di Desa Sindangsari praktek ini terjadi, meskipun pengetahuan gizi masyarakatnya memadai namun banyak yang belum menerapkannya dalam kebiasaan makan (food habit) yang masih berfokus pada jenis makanan tertentu misalnya sumber karbohidrat adalah beras. Padahal mie atau bihun juga merupakan sumber karbohidrat juga namun dianggap

sebagai lauk, jadi proporsi karbohidrat dominan,
ini sebagai salah satu contohnya.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan dalam bab sebelumnya maka dalam penelitian Ketahanan Pangan Berbasis *Role of Household Structure* di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ketersediaan dan distribusi pangan sudah mencukupi mengingat Banten adalah produsen beras peringkat 9 tingkat nasional tahun 2020 berdasarkan data BPS yang rilis tahun 2021 ini. Selain itu akses pangan baik keluar atau masuk menuju wilayah Desa Sindangsari juga mudah dan terjangkau. Pemanfaatan lahan baik pekarangan rumah maupun lahan desa yang dikelola oleh kelompok karang taruna seluas 3000 m² juga dioptimalkan untuk pemenuhan pangan dan selain ditanai sayuran juga digunakan untuk perikanan sebagai sumber protein.

2. Dalam hal daya beli rumah tangga (*purchasing power*), terdapat lebih dari satu anggota dalam rumah tangga yang berperan sebagai pencari nafkah sehingga kebutuhan pangan masih tercukupi. Selain itu terdapat pula program-program pemerintah yang bersifat *income supplement* misalnya program Rumah Desa Sehat (RDS) dengan menggunakan dana desa dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dananya bersumber dari APBN membantu warga untuk memenuhi gizi keluarga.
3. Dalam hal Kebiasaan Makan (*food habit*) masyarakat pada umumnya sudah memiliki pengetahuan gizi yang memadai namun belum menerapkannya dalam pemenuhan pangan rumah tangga sehari-hari sehingga belum terjadi diversifikasi atau keanekaragaman pangan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka rekomendasinya antara lain optimalisasi penggunaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan Desa Sindangsari memiliki kelompok tani Berkah

Mandiri yang handal dan dapat dioptimalkan perannya untuk peningkatan stok atau ketersediaan pangan. Masih diperlukan peningkatan pengetahuan gizi (*food knowledge*) yang seimbang dalam masyarakat untuk mengubah kebiasaan makan (*food habit*) yang belum berpedoman pada gizi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Baliwati, Yayuk Farida. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Swadaya.

Béreš, Martin 2011. *Role Theory in the Social Work in the Context of Gender Stereotypes*. p.174-198.

Darmawan, Dwi Putra. 2011. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga dalam Konteks Pertanian Berkelanjutan*. Udayana University Press

Dirhamsyah, Teddy.dkk. 2016. *Ketahanan Pangan: Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa*. Yogyakarta: Plantaxia

Molteldo, Ana, Nathalie Troubat, Michael Lokshin, and Zurab Sajaia. 2014. *Analyzing Food Security Using Household Survey Data: Streamlined Analysis with ADePT Software*. DOI: 10.1596/978-1-4648-0133-4. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0

Sharafkhani Rahim., Dastgiri Saeed, Gharaaghaji Asl Rasool, Ghavamzadeh Saeed. 2011. *Factors Influencing Household Food Security Status*. Food and Nutrition Sciences, 2011, 2, 31-34.doi:10.4236/fns.2011.21004 (<http://www.SciRP.org/journal/fns>)

Susilo, Edi.,dkk. 2017. *Adaptasi Manusia, Ketahanan Pangan dan Jaminan Sosial Sumberdaya*. Malang: UB Press

Sirojuddin Arif, Widjajanti Isdijoso,Akhmad Ramadhan Fatah,Ana Rosidha Tamyis. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020 (*Laporan Penelitian*) *The SMERU Research Institute*, Agustus 2020

Siti Rohmah & Suhel. 2015. Analisis Konsumsi Pangan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Ojek di Kota Palembang. *Proceeding Sriwijaya Economic and Business Conference 2015*. ISBN 979-587-563-9.

https://repository.unsri.ac.id/24613/1/14_IE_S_EABC_Siti_Rohima.pdf

Dokumen dan Aturan Perundangan:

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2020. *Indeks Ketahanan Pangan 2020*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Dinas Pertanian Kota Serang. 2020. *Gambaran Kondisi Ketahanan Pangan Kota Serang Tahun 2019*. Serang: Dinas Pertanian Kota Serang.

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2015*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.

Kementerian Pertanian. 2020. *Indeks Ketahanan Pangan 2020*.

Permenkes Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

Website:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191030141107-4-111356/duh-ada-88-wilayah-di-ri-masih-rawan-pangan> diakses 27 November jam 21.43 sindangsari.net

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html> diakses 23 Juli 2021 jam 11.40 WIB

<http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/ikp-2020-20210120fix.pdf> diakses 9 Agustus 2021 jam 00.46 WIB

<https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/171> diakses 12 Agustus 2021 jam 13.03 WIB

<https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/110> diakses 12 Agustus 2021 jam 14.26 WIB

<https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/107> diakses 12 Agustus 2021 jam 14.34 WIB

<http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021>

<https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/4275> diakses 13 Agustus 2021

<https://serangkab.go.id/detail/dkpp-kabupaten-serang-launching-pasar-mitra-tani> diakses 13 Agustus 2021

LAMPIRAN



Wawancara dengan Sekdes Desa Sindangsari





Observasi dan Pencarian Data

TENTANG PENULIS

Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si.



Lahir di Pacitan, Jawa Timur tanggal 10 Februari 1976 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan bertempat tinggal di Komplek Citra Gading, Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Menamatkan pendidikan S1 Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (1998); S2 Administrasi Publik di MAP Universitas Jenderal Soedirman (2010) dan saat ini sedang menempuh S3 Administrasi Publik di FHISIP Universitas Terbuka (2020 sd sekarang).

Menjadi pengajar di Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak tahun 2004 hingga sekarang. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Psikologi Sosial, Etika Administrasi, MSDM Sektor Publik dan Ketahanan Pangan. Beberapa artikel yang ditulis dan telah diterbitkan di beberapa jurnal antara lain JIPAGs Magister Administrasi Publik

(MAP) Untirta, JDKP Universitas Serang Raya (Unsera) dan JAP Prodi Administrasi Publik FISIP Untirta. Karya buku yang pernah diterbitkan adalah Psikologi Sosial (Penerbit Graha Ilmu, 2014) dan Dinamika Administrasi Publik (Penerbit CV AA Risky, 2019).

Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si.



Lahir di Wates Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 April 1970, merupakan putri kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Prawoto Hadi (Alm) dan Ibu Suyati, beragama Islam dan berkewarganegaran Indonesia, beralamat di Perumahan Persada Banten Blok Cluster Anyer Blok i1 No. 16 RT. 05/006 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten.

Sebelum menjadi dosen pada Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, penulis pernah bekerja di sebuah perusahaan kontraktor Nasional PT. Elnusa Petrofin (1997) sebagai Procurement Administrator, dan perusahaan kontraktor multinasional MEI Project Engineering Ltd sebagai sekeretaris Project Manager (1998). Pengalaman organisasi pernah menjadi Bendahara pada organisasi Mahasiswa Pecinta Alam FISIP Universitas Jenderal Soedirman.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Jenderal Soedirman, menyelesaikan

pendidikan S-2 pada program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman dan menyelesaikan pendidikan S-3 pada Program Pascasarjana Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran.

Nikki Prafitri, S.Sos., M.Si.



Lahir di Jakarta, 1 Maret 1993 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan bertempat tinggal di Cileungsi, Bogor.

Menamatkan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Publik di FISIP Universitas Jenderal Soedirman (2015); S2 Ilmu Administrasi di Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman (2017). Berprofesi sebagai Dosen pada Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak tahun 2018 hingga sekarang. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Ilmu Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen Pelayanan Publik. Karya buku yang pernah Dinamika Administrasi Publik (Penerbit CV. AA Rizky, 2019).
